

Nama : Clara Kelviana Kerin

NPM : 2313031064

Kelas : 23_C

Mata Kuliah : Ekonomi Pendidikan

Dosen Pengampu : DR. PUJIATI, M.PD., DR. MEYTA PRITANDARI, M.PD.,
FANNI RAHMAWATI, M.PD

UAS EKONOMI PENDIDIKAN

Soal 1 – Efisiensi Anggaran Pendidikan

Kasus

Pemerintah Kabupaten A mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 30% dari APBD. Sebagian besar dana digunakan untuk pembangunan gedung sekolah baru, sedangkan pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan pengadaan media pembelajaran digital masih sangat terbatas. Setelah lima tahun, angka partisipasi sekolah meningkat, tetapi kualitas hasil belajar siswa tidak mengalami peningkatan signifikan.

Pertanyaan

1. Analisis penggunaan anggaran pendidikan pada kasus tersebut berdasarkan konsep efisiensi internal dan eksternal pendidikan.
2. Jelaskan dampak kebijakan tersebut terhadap kualitas sumber daya manusia.

Berikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif

JAWAB:

1. Analisis penggunaan anggaran pendidikan berdasarkan konsep efisiensi internal dan eksternal

a. Efisiensi Internal Pendidikan

Efisiensi internal berhubungan dengan hubungan antara masukan (input) dan keluaran (output) dalam proses pendidikan, di mana tujuan utamanya adalah memperoleh hasil maksimal dengan biaya tertentu atau biaya minimal untuk hasil tertentu (Suprihatin, 2020).

Pada kasus Kabupaten A, penggunaan anggaran dinilai **tidak efisien secara internal**. Hal ini dikarenakan alokasi dana terpusat pada pembangunan fisik (gedung sekolah), sementara komponen penentu kualitas proses belajar-mengajar seperti pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan sarana pembelajaran digital justru minim mendapat porsi. Akibatnya, meskipun tersedia fasilitas bangunan yang memadai, proses pendidikan di dalamnya tidak berjalan secara optimal karena faktor pendukung utama (guru yang kompeten dan media ajar yang memadai) belum terpenuhi. Rasio antara biaya yang dikeluarkan dengan peningkatan kualitas hasil belajar menjadi tidak sebanding atau rendah (Slamet, 2018).

b. Efisiensi Eksternal Pendidikan

Efisiensi eksternal mengukur sejauh mana hasil pendidikan berkontribusi terhadap kebutuhan masyarakat dan pembangunan, atau hubungan antara keluaran pendidikan dengan dampak yang dihasilkan bagi lingkungan sosial dan ekonomi (Psacharopoulos & Woodhall, 2019).

Dalam kasus ini, kebijakan tersebut juga **belum efisien secara eksternal**. Peningkatan angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa akses pendidikan berhasil diperluas, namun tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas lulusan. Artinya, lulusan yang dihasilkan belum memiliki kemampuan atau kompetensi yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Secara ekonomi, investasi pendidikan ini belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk pembangunan daerah, sehingga pengembalian investasi pendidikan menjadi rendah (Djaali, 2021).

2. Dampak kebijakan tersebut terhadap kualitas sumber daya manusia

Kebijakan alokasi anggaran yang tidak seimbang tersebut berdampak negatif pada pembentukan kualitas sumber daya manusia, antara lain:

- 1) Kompetensi lulusan rendah. Karena proses pembelajaran tidak didukung guru yang terlatih dan media yang relevan, kemampuan kognitif, keterampilan, dan karakter siswa tidak berkembang maksimal. Lulusan hanya memiliki sertifikat pendidikan, namun tidak memiliki keahlian yang memadai (Suprihatin, 2020).

- 2) Ketidaksesuaian dengan kebutuhan Pembangunan. Kurangnya pengembangan kurikulum membuat materi ajar tidak relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan dunia kerja atau masyarakat. Akibatnya, sumber daya manusia yang dihasilkan sulit bersaing dan kurang mampu mendorong kemajuan ekonomi daerah (Slamet, 2018).
- 3) Terhambatnya peningkatan produktivitas. Kualitas SDM yang rendah akan berujung pada rendahnya produktivitas kerja di masa depan. Hal ini memperlambat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten A karena produktivitas merupakan kunci utama pembangunan daerah (Djaali, 2021).

Rekomendasi kebijakan yang lebih efektif

Berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas ekonomi pendidikan, berikut rekomendasi kebijakan:

1. **Melakukan realokasi anggaran berbasis prioritas:** mengubah komposisi anggaran dengan mengurangi sedikit porsi pembangunan fisik yang berlebihan, dan menambah alokasi untuk pengembangan mutu. Idealnya, porsi anggaran terbagi seimbang antara pembangunan sarana fisik, peningkatan kualitas pendidik, dan pengadaan sarana pembelajaran (Psacharopoulos & Woodhall, 2019).
2. **Fokus pada peningkatan kualitas proses pembelajaran:** mengalokasikan dana yang cukup besar untuk pelatihan berkelanjutan bagi guru, penyempurnaan kurikulum yang kontekstual, serta pengadaan teknologi dan media pembelajaran digital. Hal ini bertujuan agar setiap biaya yang dikeluarkan benar-benar meningkatkan kualitas belajar siswa (Suprihatin, 2020).
3. **Penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas:** kebijakan pendidikan tidak hanya mengejar angka kuantitas (partisipasi), tetapi juga kualitas hasil. Pemerintah daerah harus menetapkan indikator keberhasilan anggaran berbasis peningkatan hasil belajar, bukan hanya ketersediaan gedung (Djaali, 2021).
4. **Evaluasi berkala penggunaan dana:** melakukan pemantauan rutin agar penggunaan anggaran selalu terarah dan memberikan manfaat maksimal, sehingga tercipta

keseimbangan antara pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan (Slamet, 2018).

Referensi:

1. Djaali, H. (2021). *Ekonomi Pendidikan: Teori dan Praktik Pengelolaan Sumber Daya Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
2. Psacharopoulos, G., & Woodhall, M. (2019). *Pendidikan untuk Pembangunan: Tantangan Ekonomi*. Terjemahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
3. Slamet. (2018). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
4. Suprihatin, S. (2020). *Pengantar Ekonomi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Soal 2 – Ketimpangan Akses Pendidikan

Kasus

Sekolah di wilayah perkotaan memiliki laboratorium lengkap, akses internet cepat, dan guru profesional. Sebaliknya, sekolah di daerah pedesaan mengalami kekurangan guru, fasilitas minim, dan keterbatasan teknologi. Akibatnya, hasil ujian siswa di desa jauh lebih rendah dibandingkan siswa di kota.

Pertanyaan

1. Jelaskan bentuk ketimpangan pendidikan pada kasus tersebut.
2. Analisis dampak ekonomi jangka panjang dari ketimpangan pendidikan.

Usulkan solusi kebijakan untuk mengurangi ketimpangan tersebut.

JAWAB:

1. Bentuk ketimpangan pendidikan pada kasus tersebut

Bentuk ketimpangan yang terjadi meliputi ketimpangan sarana prasarana, ketimpangan kualitas tenaga pendidik, dan ketimpangan akses teknologi. Sekolah di kota memiliki fasilitas lengkap, internet memadai, dan guru yang kompeten, sedangkan sekolah di desa kekurangan fasilitas, minim teknologi, dan kekurangan tenaga pendidik. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan dalam kesempatan belajar, di mana siswa di desa tidak mendapatkan input pendidikan yang setara dibandingkan siswa di kota, sehingga

berdampak langsung pada perbedaan capaian hasil belajar yang signifikan antar kedua wilayah.

2. Dampak ekonomi jangka panjang dari ketimpangan pendidikan

Dampak ekonomi jangka panjangnya adalah ketimpangan kualitas sumber daya manusia antar wilayah, di mana penduduk desa memiliki kompetensi dan produktivitas kerja yang lebih rendah dibanding penduduk kota. Hal ini menyebabkan kesenjangan pendapatan yang makin melebar, mobilitas sosial yang sulit, serta terjadinya urbanisasi besar-besaran karena masyarakat desa pindah ke kota mencari kesempatan lebih baik. Akibatnya, pembangunan ekonomi menjadi tidak merata, pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal melambat, dan potensi ekonomi nasional tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal karena banyak tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian memadai.

Usulan solusi kebijakan untuk mengurangi ketimpangan

Solusi yang dapat diterapkan meliputi pemerataan alokasi anggaran pendidikan dengan porsi lebih besar dialokasikan ke daerah tertinggal untuk pembangunan fasilitas dan penyediaan teknologi. Pemerintah juga perlu menerapkan kebijakan insentif khusus bagi guru agar mau bertugas dan menetap di daerah pedesaan, serta mengembangkan sistem pembelajaran berbasis teknologi jarak jauh agar materi dan kualitas pengajaran dari kota dapat diakses siswa di desa. Selain itu, perlu adanya standar pelayanan minimal pendidikan yang sama di seluruh wilayah untuk menjamin setiap siswa mendapatkan kualitas pendidikan yang setara tanpa memandang lokasi sekolah.

Soal 3 – Pengangguran Terdidik

Kasus

Jumlah lulusan perguruan tinggi di Kota B meningkat setiap tahun. Namun, banyak lulusan menganggur atau bekerja tidak sesuai bidang studinya. Dunia industri menilai kompetensi lulusan belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Pertanyaan

1. Analisis penyebab pengangguran terdidik berdasarkan teori human capital.
2. Jelaskan hubungan antara pendidikan dan pasar kerja pada kasus tersebut.

Berikan rekomendasi untuk meningkatkan relevansi lulusan.

JAWAB:

1. Analisis penyebab pengangguran terdidik berdasarkan teori human capital

Menurut teori human capital, pendidikan dianggap sebagai investasi yang meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan produktivitas seseorang sehingga memiliki nilai lebih di pasar kerja. Pada kasus ini, pengangguran terdidik terjadi karena peningkatan jumlah lulusan tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas dan relevansi keterampilan yang dibutuhkan industri. Investasi pendidikan yang diambil lulusan belum menghasilkan modal manusia yang sesuai standar kebutuhan pasar, karena materi pendidikan seringkali lebih bersifat teori dan tidak sesuai perkembangan teknologi atau keahlian praktis yang dibutuhkan dunia usaha. Akibatnya, meskipun tingkat pendidikan tinggi, produktivitas yang ditawarkan dianggap rendah oleh pemberi kerja, sehingga lulusan sulit mendapatkan pekerjaan yang sesuai atau justru menganggur.

2. Hubungan antara pendidikan dan pasar kerja pada kasus tersebut

Hubungan yang terjadi adalah ketidaksesuaian atau ketimpangan antara output pendidikan dengan permintaan pasar kerja. Pendidikan berfungsi menyiapkan tenaga kerja, sedangkan pasar kerja adalah penampung tenaga kerja tersebut, keduanya seharusnya berjalan selaras. Di Kota B, jumlah lulusan yang dihasilkan pendidikan melimpah, namun profil kompetensi yang dimiliki tidak sesuai apa yang dicari industri. Hal ini menunjukkan mekanisme penyesuaian antara lembaga pendidikan dan dunia kerja belum berjalan baik, di mana sinyal kebutuhan pasar tidak diterjemahkan dengan baik ke dalam kurikulum atau proses pembelajaran. Akibatnya terjadi kelebihan pasokan tenaga kerja di bidang tertentu dan kekurangan di bidang lain, yang memaksa lulusan bekerja di luar keahlian atau tidak terserap sama sekali.

Rekomendasi untuk meningkatkan relevansi lulusan

Langkah yang dapat dilakukan meliputi penyusunan kurikulum pendidikan yang melibatkan peran aktif dunia industri dan usaha agar materi ajar sesuai kebutuhan nyata pasar kerja. Lembaga pendidikan juga perlu menambah porsi praktik kerja, magang, dan keterampilan lunak (soft skill) agar lulusan lebih siap pakai dan adaptif. Selain itu, perlu dilakukan pemetaan kebutuhan tenaga kerja secara berkala sebagai dasar perencanaan jurusan dan kuota

mahasiswa, serta memberikan bimbingan karir agar lulusan memahami peluang dan persaingan kerja. Kerjasama kemitraan antara perguruan tinggi dan industri juga harus diperkuat agar proses pendidikan selalu mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan ekonomi.

Soal 4 – Kenaikan Biaya Pendidikan

Kasus

Sebuah universitas swasta menaikkan uang kuliah sebesar 25% untuk meningkatkan fasilitas kampus dan layanan akademik. Kebijakan tersebut mendapat protes dari mahasiswa karena dinilai memberatkan keluarga berpenghasilan rendah.

Pertanyaan:

1. Analisis kasus tersebut berdasarkan konsep pendidikan sebagai barang publik dan barang privat.
2. Jelaskan dampak sosial ekonomi dari kenaikan biaya pendidikan.
3. Apakah pemerintah perlu melakukan intervensi? Jelaskan alasannya.

JAWAB:

1. Analisis kasus berdasarkan konsep pendidikan sebagai barang publik dan barang privat Pendidikan memiliki sifat ganda, yaitu mengandung unsur barang publik dan barang privat. Sebagai **barang publik**, pendidikan memberikan manfaat luas bagi masyarakat seperti peningkatan produktivitas dan kemajuan peradaban, sehingga aksesnya sebaiknya tetap terjamin dan terjangkau. Sebagai **barang privat**, pendidikan memberikan keuntungan langsung bagi individu yang menempuhnya berupa peluang kerja dan pendapatan lebih tinggi, sehingga wajar jika ada biaya yang harus ditanggung penerima manfaat langsung. Pada kasus ini, universitas swasta lebih menonjolkan sifat barang privat dengan menetapkan biaya sesuai biaya produksi jasa pendidikan, namun kenaikan 25% tersebut mengabaikan unsur kepentingan publik dan kemampuan daya beli masyarakat, sehingga menimbulkan keluhan karena beban biaya jatuh sepenuhnya ke individu tanpa pertimbangan keadilan.
2. Dampak sosial ekonomi dari kenaikan biaya pendidikan Dampak sosial ekonomi utamanya adalah menurunnya akses pendidikan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, yang berisiko memperlebar kesenjangan

sosial karena pendidikan hanya menjadi milik kelompok mampu saja. Secara ekonomi, kenaikan biaya ini menambah beban pengeluaran rumah tangga, mengurangi daya beli masyarakat, dan berpotensi menurunkan jumlah angkatan kerja terdidik di masa depan jika banyak yang tidak mampu melanjutkan sekolah. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia dan memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah karena investasi pendidikan masyarakat menjadi berkurang.

3. Apakah pemerintah perlu melakukan intervensi? Jelaskan alasannya

Ya, pemerintah sangat perlu melakukan intervensi. Alasannya, pendidikan memiliki dampak eksternal positif yang besar bagi kemajuan bangsa, sehingga jika diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar akan terjadi ketimpangan akses dan kegagalan pasar yang merugikan kepentingan publik. Intervensi diperlukan untuk menjamin keadilan dan pemerataan kesempatan belajar, misalnya melalui pengaturan batas kenaikan biaya, pemberian subsidi, beasiswa, atau pinjaman pendidikan bagi kelompok tidak mampu. Tanpa campur tangan pemerintah, tujuan pendidikan sebagai sarana pemerataan kesempatan hidup dan peningkatan kualitas SDM nasional tidak akan tercapai secara maksimal dan hanya dinikmati segelintir orang saja.

Soal 5 – Digitalisasi Pembelajaran

Kasus

Pasca pandemi, sekolah menerapkan pembelajaran berbasis digital. Namun, siswa dari keluarga kurang mampu mengalami kesulitan membeli perangkat dan kuota internet sehingga partisipasi belajar menurun.

Pertanyaan:

1. Analisis masalah tersebut menggunakan konsep biaya pendidikan dan *opportunity cost*.
2. Jelaskan dampak kesenjangan digital terhadap kualitas pendidikan.

Berikan solusi kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut.

JAWAB:

1. Analisis masalah menggunakan konsep biaya pendidikan dan *opportunity cost*

Berdasarkan konsep biaya pendidikan, digitalisasi menambah komponen biaya baru berupa pembelian perangkat dan kuota internet yang kini menjadi kewajiban siswa. Bagi keluarga kurang mampu, kenaikan beban biaya ini sangat berat dan sulit dipenuhi. Berdasarkan konsep *opportunity cost* (biaya peluang), pengeluaran untuk kebutuhan pendidikan digital memaksa keluarga mengorbankan kebutuhan pokok lain seperti makanan atau kesehatan. Jika tidak mampu membayar, siswa harus mengorbankan kesempatan belajar dan potensi masa depan demi keterbatasan sumber daya ekonomi keluarga.

2. Dampak kesenjangan digital terhadap kualitas pendidikan

Kesenjangan digital menciptakan perbedaan kualitas masukan pendidikan antar siswa. Siswa mampu mendapatkan akses materi lengkap dan pembelajaran optimal, sementara siswa kurang mampu tertinggal akses dan materi belajarnya. Akibatnya, muncul ketimpangan hasil belajar yang melebar, mutu pendidikan menjadi tidak merata, dan tujuan pemerataan kualitas pendidikan nasional tidak tercapai. Dalam jangka panjang, hal ini memperkuat kesenjangan sosial ekonomi karena pendidikan tidak lagi menjadi sarana pemerataan kesempatan hidup.

Solusi kebijakan untuk mengatasi masalah

Pemerintah perlu menyediakan subsidi kuota internet dan penyediaan perangkat digital secara merata ke sekolah atau siswa kurang mampu agar biaya pendidikan tidak membebani keluarga. Sekolah harus menerapkan sistem pembelajaran hibrida yang tetap menjamin akses materi bagi yang tidak memiliki fasilitas digital. Selain itu, perlu pembangunan infrastruktur internet gratis di wilayah tertinggal agar akses teknologi menjadi hak yang setara bagi semua warga didik